

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perusahaan kini menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari strategi korporasi, tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi. Perusahaan secara aktif berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pergeseran paradigma ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi, baik di tingkat global maupun nasional, bahwa praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan dan praktik perusahaan dengan pencapaian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sinergis. (Fauzan & Hendra, 2024).

Di Indonesia, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas masalah pembangunan, seperti kesenjangan sosial ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta kerusakan lingkungan, yang menuntut pendekatan penanganan menyeluruh dan berkesinambungan (Adriyanto et al., 2020). Dalam konteks ini, perusahaan memposisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan kepentingan bisnis dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan diharapkan aktif berperan sebagai agen pembangunan sosial

yang menekankan keberlanjutan jangka panjang melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi, sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai entitas ekonomi (Aziz, 2021).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep sekaligus kerangka kerja yang dipilih oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjaga keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan. Munculnya CSR dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran bahwa perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan juga berperan sebagai elemen sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, CSR merepresentasikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai konsekuensi dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya (Irawan, 2024). Oleh karena itu, penerapan CSR menuntut perusahaan untuk secara proaktif dan akuntabel mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan serta kegiatan yang dijalankan, guna meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya (Pratiwi et al., 2022).

Lebih lanjut, CSR merepresentasikan wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip etika, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan paradigma tersebut, komunitas global melalui United Nations meluncurkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka

kerja universal yang mengarahkan keterlibatan seluruh negara dan lintas sektor, termasuk sektor korporasi, dalam agenda pembangunan berkelanjutan. SDGs meliputi 17 tujuan yang saling berhubungan dan bersifat menyeluruh, dengan menitikberatkan pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai elemen utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, korporasi memiliki posisi strategis dan tanggung jawab yang signifikan dalam mendukung realisasi target-target *Sustainable Development Goals*. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya pengelolaan dampak lingkungan secara sistematis, pengalokasian investasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, serta penerapan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan (Sofiana et al., 2022). Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif perusahaan, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam proses dan kebijakan bisnis perusahaan, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Yudha et al., 2021). Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* berperan sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kewajiban sosial dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan secara berkesinambungan (Capah et al., 2023).

Di sisi lain, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi program CSR oleh perusahaan masih menghadapi sejumlah kendala sosial yang signifikan. Salah

satu fenomena yang kerap muncul adalah terbentuknya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan CSR yang bersifat konsumtif. Pola bantuan semacam ini berpotensi menumbuhkan mentalitas ketidakmandirian, sehingga menghambat proses pemberdayaan serta pencapaian kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat (Nasution, 2021). Lebih lanjut, kondisi ketergantungan tersebut dapat memicu siklus kemiskinan yang bersifat berkelanjutan, karena masyarakat cenderung berada dalam posisi pasif dan kurang terdorong untuk mengembangkan kapasitas, keterampilan, serta potensi ekonomi secara mandiri (Hidayat & Tandilangi, 2024).

Fenomena tersebut kian memperoleh urgensi dalam menghadapi dinamika dan tekanan ekonomi makro di Indonesia. Berbagai indikasi permasalahan struktural masih menunjukkan eksistensinya, yang tercermin antara lain dari tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat sebesar 4,76%, dengan porsi yang cukup besar berasal dari kelompok usia produktif, khususnya penduduk berusia 15–24 tahun. Di samping itu, tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah terbatasnya tingkat daya saing serta kapasitas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meskipun sektor ini memiliki peran strategis sebagai penopang utama perekonomian nasional (Yunus et al., 2023). Dalam kondisi tersebut, program *Corporate Social Responsibility* yang hanya menitikberatkan pada pemberian bantuan langsung yang bersifat konsumtif cenderung tidak mampu menjawab akar permasalahan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR hingga saat ini belum sepenuhnya optimal

dalam menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Harto et al., 2022).

Dengan demikian, implementasi *Corporate Social Responsibility* perlu diarahkan pada perubahan paradigma, dari pendekatan yang bersifat filantropis dan berorientasi pada pemberian bantuan jangka pendek menuju model pemberdayaan yang berkelanjutan. Transformasi CSR melalui model pemberdayaan ini secara fundamental memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus memposisikan program sebagai instrumen strategis dalam akselerasi SDGs global. Secara spesifik, inisiatif ini menjadi manifestasi nyata dari poin SDGs ke-8, yang mengintegrasikan aspek inklusivitas ekonomi dengan penyediaan lapangan kerja produktif demi mencapai kemakmuran yang merata.

Dalam ranah Badan Usaha Milik Negara, pemerintah mendorong terjadinya perubahan regulatif yang substantif melalui penerbitan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Regulasi ini menjadi tonggak strategis dalam pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam pelaksanaan TJSL di seluruh BUMN, khususnya melalui kewajiban penyusunan indikator SDGs yang terintegrasi dalam dashboard kinerja TJSL. Perubahan kebijakan tersebut tidak hanya menegaskan komitmen negara terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan adanya tuntutan struktural bagi BUMN untuk memastikan keselarasan antara program *Corporate Social Responsibility* dan capaian SDGs. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan urgensi

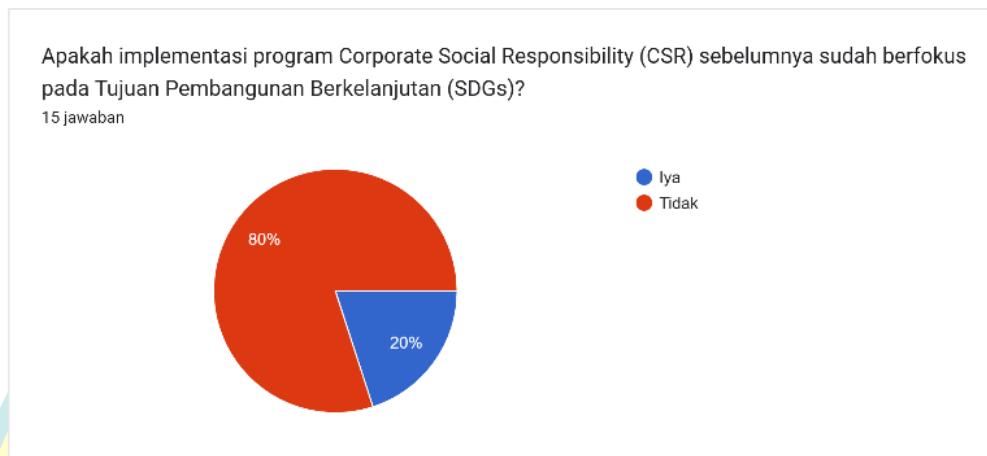
akademik untuk mengkaji secara kritis bagaimana implementasi program CSR di lingkungan BUMN dapat dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara sistematis agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebelum regulasi yang berlaku saat ini ditetapkan sebagai pedoman utama, ketentuan mengenai penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara telah melalui berbagai tahapan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan. Pada fase awal, pelaksanaan TJSL BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 sebagai respons terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional. Kedua regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan normatif dalam memperkuat peran BUMN agar mampu menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebelum kerangka TJSL diterapkan, tanggung jawab sosial BUMN dikenal melalui skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku seiring dengan berlakunya Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021. Pergeseran regulasi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma kebijakan, dari pendekatan filantropis yang bersifat karitatif menuju pendekatan strategis yang menempatkan TJSL sebagai instrumen kontribusi BUMN dalam mendukung

pencapaian *Sustainable Development Goals* secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Kehadiran ISO 26000 memperkuat regulasi nasional dengan menawarkan panduan universal yang menekankan pada akuntabilitas dan etika organisasi. Standar ini mentransformasi konsep CSR dari sekadar kewajiban normatif menjadi instrumen strategis untuk mendukung pencapaian SDGs. Bagi entitas seperti BUMN, penerapan standar ini krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan operasional tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mensinergikan kepentingan *stakeholders* ke dalam pola hubungan yang saling menguntungkan (*mutualistic*) dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan gambaran awal yang komprehensif mengenai pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), peneliti melaksanakan tahap pra-riset dengan menyebarkan kuesioner kepada staf Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta unit kerja terkait. Informasi yang dihimpun melalui survei ini digunakan sebagai dasar analitis dalam menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi program CSR perusahaan, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*. Selanjutnya, hasil pra-riset tersebut disajikan dalam bentuk visualisasi diagram sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Intelligentia - Dignitas



Gambar 1. 1 Hasil Pra Riset Implementasi Program CSR Sebelumnya

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil pengamatan terhadap diagram menunjukkan bahwa, sebagian besar responden, yakni 80%, menyatakan "Tidak", sedangkan 20% memilih "Iya". Persentase yang sangat tinggi (80%) untuk jawaban "Tidak" menunjukkan bahwa fokus program CSR sebelumnya cenderung belum terintegrasi secara langsung dengan kerangka SDGs. Hal ini, berdasarkan observasi dan wawancara awal, disebabkan oleh belum adanya kebijakan internal yang secara ketat mengatur bahwa program CSR harus dipetakan dan dilaporkan sesuai dengan indikator-indikator SDGs, sehingga pelaksanaan program lebih sering didasarkan pada kebutuhan mendesak atau regulasi umum tanpa merujuk target SDGs spesifik.

Intelligentia - Dignitas



Gambar 1. 2 Hasil Pra Riset Tantangan Implementasi Program CSR

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil Pra Riset pada diagram kedua menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 86,7%, menyatakan “Iya” bahwa terdapat tantangan dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* yang diselaraskan dengan SDGs. Sebaliknya, hanya 13,3% responden yang menjawab “Tidak”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pihak yang terlibat menyadari adanya kendala dalam menyesuaikan program CSR dengan target-target berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan staf unit TJSL PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), informan mengungkapkan bahwa tantangan tersebut banyak berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan integrasi program CSR agar tidak hanya sebatas aktivitas sosial biasa, tetapi lebih diarahkan pada penciptaan dampak positif yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs. Perusahaan saat ini berupaya mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan nilai bersama (*shared values*) dan membangun kemandirian masyarakat, melalui program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk berkelanjutan, sehingga perusahaan saat ini secara bertahap mengalihkan fokus program dari hanya

bantuan sosial biasa menjadi investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori CSR yang relevan, antara lain teori *stakeholder* yang menekankan manajemen hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai berkelanjutan (Ikram et al., 2019). Selain itu, teori legitimasi menggarisbawahi kewajiban perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial lingkungan sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan keberadaannya oleh masyarakat (Romli & Reza Zaputra, 2022). Konsep *triple bottom line* berperan sebagai landasan strategis yang mendorong perusahaan untuk memperluas fokusnya melampaui pencapaian keuntungan finansial semata, dengan memprioritaskan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai komponen esensial dari strategi bisnis berkelanjutan (Elkington, 1997).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait CSR dan SDGs telah dilakukan di berbagai sektor industri dan negara. Humaira (2023) menemukan bahwa CSR di PT Bio Farma memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs melalui pengimplementasian standar GRI. Penelitian Capah et al., (2023) menyoroti pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan kapasitas komunitas, khususnya terkait pengelolaan limbah dan pembentukan budaya keberlanjutan. Selaras dengan itu, Yuniarto et al., (2024) meneliti penerapan ICSR pada UMKM retail berbasis nilai-nilai Islam, yang telah melaksanakan sebanyak 42 kegiatan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, terdapat satu kegiatan yang dinilai tidak

sesuai dengan prinsip syariah, yakni memberikan potongan harga kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit yang diterbitkan oleh bank konvensional. Sementara itu, Trisnawati et al., (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada UMKM Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press mencakup berbagai program, mulai dari pemberian sembako rutin, bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, sponsorship pada hari besar, dukungan kesehatan melalui BPJS, hingga pengelolaan limbah kertas.

Urgensi penelitian ini muncul dari adanya perubahan regulasi yang menuntut BUMN untuk mengimplementasikan program CSR yang sejalan dengan SDGs. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 berfungsi sebagai kerangka regulasi utama dalam pelaksanaan penugasan CSR berbasis SDGs di lingkungan BUMN, yang menegaskan urgensi penyelarasan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian empiris sebelumnya masih relatif terbatas dalam mengkaji penerapan CSR berbasis SDGs, khususnya pada holding BUMN yang bergerak di sektor jasa survei, terutama setelah terbitnya regulasi terbaru Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk dianalisis secara lebih komprehensif. Selain itu, studi mengenai CSR pada sektor UMKM juga menunjukkan adanya keterbatasan, terutama dalam mengintegrasikan program sosial ke dalam strategi bisnis jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Sebagian besar praktik CSR di UMKM masih bersifat filantropis dan

belum menekankan pada penguatan kapasitas, inovasi, maupun pengembangan kemitraan jangka panjang (Dhaifullah & Shohiha, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana CSR dapat secara efektif mendorong kemandirian ekonomi masyarakat binaan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk di analisis secara mendalam bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai BUMN sektor jasa mengimplementasikan program CSR yang terintegrasi dengan SDGs serta mampu membina UMKM agar berdaya saing dan berkelanjutan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi CSR dan SDGs di lingkungan BUMN jasa pasca-regulasi terbaru serta analisis terhadap kontribusi CSR dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan UMKM binaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi teoritis terhadap praktik CSR berorientasi keberlanjutan yang relevan dengan konteks nasional dan kebijakan korporasi terkini.

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan program CSR dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman CSR yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi peningkatan efektivitas program CSR di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kolaborasi strategis antara perusahaan, pemerintah, dan

masyarakat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkesinambungan di Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* yang terintegrasi dengan indikator SDGs ke-8, ke-12, dan ke-17?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* berbasis *SDGs*?
3. Bagaimana dampak program *Corporate Social Responsibility* di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) terhadap pencapaian sesuai indikator *SDGs*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi program *Corporate Social Responsibility* PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang terintegrasi dengan indikator SDGs ke-8, ke-12, dan ke-17.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* berbasis *SDGs*.
3. Untuk menganalisis dampak program *Corporate Social Responsibility* di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) terhadap pencapaian sesuai indikator *SDGs*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Penelitian ini secara teoritis memberikan kerangka konseptual mengenai integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam strategi korporasi, yang kemudian dapat diaplikasikan sebagai gambaran analitis mendalam mengenai efektivitas implementasi program CSR perusahaan. Secara praktis, temuan ini diproyeksikan menjadi bahan evaluasi strategis bagi manajemen untuk mengoptimalkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi terbaru Kementerian BUMN. Dengan demikian, hasil studi ini akan memperkuat legitimasi sosial perusahaan sebagai BUMN yang etis dan berorientasi pada keberlanjutan, guna menciptakan sinergi positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkuat kajian *Corporate Social Responsibility* berbasis SDGs, khususnya pada konteks Badan Usaha Milik Negara, serta memperkaya khazanah literatur akademik sebagai acuan pengembangan teori masa depan. Secara praktis, keberadaan studi ini diharapkan mampu mendorong jalinan kerja sama yang lebih erat antara dunia akademik dan industri guna menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan dinamika kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak

hanya memperluas pemahaman akademik tetapi juga menjadi referensi praktis yang relevan bagi pengembangan standar profesional di lingkungan universitas.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan landasan teoritis bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai kompleksitas isu CSR dan keberlanjutan, yang secara praktis diimplementasikan melalui penajaman kapabilitas analitis dalam membedah fenomena industri secara nyata. Hasil studi ini tidak hanya berhenti sebagai kontribusi pemikiran semata, namun juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang dapat digunakan penulis dalam memberikan rekomendasi praktis bagi dunia usaha. Hal ini membuka ruang bagi penulis untuk mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif serta meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola program keberlanjutan yang berdampak luas.

Intelligentia - Dignitas